BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah pelabuhan perikanan yang terletak di Bungus Barat, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelabuhan ini dibangun pada tahun 1981 melalui Proyek Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Sumatera (*Sumatera Fisheries Development Project*) yang berlangsung hingga 1989 dengan dukungan dana dari Bank Pembangunan Asia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan salah satu Pelabuhan perikanan strategis di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung kegiatan penangkapan ikan dan distribusi hasil perikanan, khususnya di wilayah Sumatera Barat. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus memiliki peran vital dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta pelayanan kepada para pelaku usaha perikanan.

Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia yang berperan sebagai penggerak utama dalam menjalankan aktivitas dan mencapai tujuan organisasi atau suatu sistem, termasuk dalam konteks pelabuhan perikanan. Sumber Daya Manusia mencakup tenaga kerja, pegawai, atau personil yang memiliki keahlian, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien.

Manajemen Sumber Daya Manusia di pelabuhan meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengembangan, dan pengawasan tenaga kerja agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi pelabuhan secara optimal. Hal ini termasuk pembinaan kompetensi, pelatihan, serta penegakan disiplin agar pegawai dan tenaga kerja memiliki motivasi dan kinerja yang tinggi.

Sumber Daya Manusia adalah aset strategis yang sangat vital dalam pengelolaan pelabuhan perikanan, karena keberhasilan operasional dan pengembangan pelabuhan sangat bergantung pada kemampuan, kedisiplinan, dan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Pada tahun 2024, jumlah personel yang terlibat dalam operasional Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus mencapai 92 orang dengan komposisi yang beragam. Dari jumlah tersebut, 36 orang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berperan dalam berbagai aspek administratif dan teknis. Selain itu, terdapat 17 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta 9 tenaga pramubakti yang turut mendukung berbagai tugas operasional. Di sisi lain, terdapat 2 tenaga PJLP dan 2 tenaga pendataan ikan yang berkontribusi dalam aspek tertentu yang mendukung kelancaran kegiatan di pelabuhan. Untuk memastikan kebersihan dan keamanan pelabuhan tetap terjaga, 26 tenaga outsourcing turut serta dalam operasional harian.

Pembinaan pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus difokuskan pada peningkatan keterampilan dan kemampuan melalui berbagai latihan dan kursus. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan para pegawai dalam menjalankan tugas mereka dengan lebih efektif.

Berikut data jumlah pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus:

Table 1.1 Data Jumlah Pegawai Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus

Jenis Kelamin	Jabatan						Jumlah
	PNS	PPPK	TKK	PJLP	Petugas Pendataan	Outsourcing	
Laki-laki	23	3	7	2	2	23	60
Perempuan	13	14	2	-	-	3	32
Jumlah	36	17	9	2	2	26	92

Sumber: (Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahunan 2024, 2024)

Dalam menjalankan fungsinya, Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari pegawai dengan berbagai jabatan dan tugas yang saling berkaitan. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia, termasuk penegakan disiplin pegawai, menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional Pelabuhan.

Penegakan secara umum berarti proses atau usaha untuk memastikan suatu aturan, norma, atau hukum dijalankan dan ditaati oleh pihak yang berkewajiban. Dalam konteks hukum, penegakan hukum adalah tindakan atau proses yang dilakukan oleh aparat berwenang untuk menerapkan, mengawasi, dan memastikan norma-norma hukum berjalan secara nyata dalam masyarakat. Ini meliputi usaha menemukan, mencegah, memulihkan, atau menghukum pelanggar hukum agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial.

Penegakan adalah proses penerapan dan pelaksanaan aturan atau hukum agar norma tersebut efektif dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.

Penegakan disiplin adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh suatu organisasi atau instansi untuk memastikan bahwa setiap anggota atau pegawainya

mematuhi aturan, tata tertib, dan norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama penegakan disiplin adalah menjaga ketertiban, meningkatkan kinerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan produktif.

Disiplin adalah sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, dan penghormatan terhadap aturan, norma, atau tata tertib yang berlaku dalam suatu lingkungan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Disiplin juga mencerminkan kesadaran dan pengendalian diri untuk mematuhi kewajiban dan larangan demi terciptanya ketertiban dan kelancaran aktivitas bersama.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disiplin pegawai adalah ketaatan dan kesadaran pegawai negeri sipil untuk mematuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(Moore, 2004) Penegakan disiplin adalah proses atau cara menegakkan suatu aturan atau tata tertib agar disiplin dapat tercapai dan menghasilkan perubahan serta penguasaan kemampuan dengan tujuan mendorong peningkatan kualitas yang lebih tinggi.

Penegakan aturan disiplin pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus merupakan proses penerapan dan pengawasan kepatuhan pegawai terhadap peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh instansi maupun pemerintah, khususnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Penegakan disiplin ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang tertib, profesional, dan mendukung kelancaran operasional pelabuhan dalam mendukung sektor perikanan.

Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan disiplin di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan pengamatan dan data yang ada, masih ditemukan tingkat pelanggaran disiplin, seperti keterlambatan masuk kerja, dan pulang sebelum waktunya. Fenomena ini menunjukkan perlunya perhatian serius dari manajemen pelabuhan dalam membangun budaya disiplin yang kuat.

Selain itu, penegakan disiplin juga melibatkan proses pembinaan dan pemberian sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Meski sudah ada regulasi yang mengatur, seperti Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, penerapan sanksi disiplin terkadang belum konsisten dan kurang efektif, sehingga berdampak pada rendahnya efek jera. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa sosialisasi, pelatihan, pengawasan yang ketat, serta penegakan sanksi yang tegas agar kedisiplinan pegawai dapat meningkat.

Berikut Data Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus pada Tahun 2024.

Tabel 1.2 Data Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin tahun 2024.

Bulan	Jumlah Pegawai	Jenis Pelanggaran
Januari	5	Absensi
Februari	8	Absensi
Maret	11	Absensi
April	15	Absensi
Mei	9	Absensi

Juni	6	Absensi
Juli	5	Absensi
Agustus	2	Absensi
September	7	Absensi
Oktober	12	Absensi
November	8	Absensi
Desember	4	Absensi

Sumber: (Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus Tahunan 2024, 2024)

Salah satu permasalahan yang muncul terkait penegakan aturan disiplin pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus adalah apakah pelaksanaan penegakan disiplin sudah dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting untuk dikaji karena ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi disiplin atau lemahnya pengawasan dapat menimbulkan ketidakpatuhan pegawai terhadap aturan, yang berdampak pada menurunnya produktivitas dan kualitas pelayanan pelabuhan.

Selain itu, terdapat fenomena pelanggaran disiplin yang masih terjadi, seperti keterlambatan dan kurangnya kesadaran akan kewajiban disiplin. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam membangun budaya disiplin yang kuat di lingkungan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

Di sisi lain, penegakan disiplin yang efektif harus didukung oleh prosedur yang transparan dan adil, termasuk sosialisasi peraturan, pembinaan pegawai, serta pemberian sanksi yang proporsional. Jika penegakan disiplin dilakukan tanpa

prosedur yang jelas atau tidak didukung bukti yang memadai, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpuasan dan menurunkan motivasi kerja pegawai.

Seiring dengan perkembangan Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus yang semakin profesional dan meningkatnya tuntutan pelayanan, pengelolaan sumber daya manusia, khususnya dalam hal penegakan disiplin, menjadi aspek krusial yang harus diperhatikan agar operasional pelabuhan dapat berjalan optimal dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan aturan disiplin pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus?
2. Apa saja tantangan dalam penegakan aturan disiplin pegawai pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus?

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan aturan disiplin pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.
2. Untuk mengetahui tantangan dalam penegakan aturan disiplin pegawai pada Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab kurangnya disiplin pegawai, khususnya dalam konteks pelaksanaan aturan dan tata tertib di lingkungan pelabuhan perikanan.
- b. Menambah referensi dan literatur tentang manajemen sumber daya manusia, terutama terkait penegakan disiplin pegawai di instansi pemerintah seperti pelabuhan perikanan.
- c. Membantu pengembangan teori manajemen disiplin pegawai dengan pendekatan pengawasan, pembinaan, dan penegakan aturan yang efektif.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan evaluasi bagi manajemen Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus dalam meningkatkan efektivitas penegakan aturan disiplin pegawai secara konsisten dan transparan.
- b. Membantu organisasi dalam mengidentifikasi kendala dan faktor penyebab pelanggaran disiplin sehingga dapat merumuskan strategi pembinaan dan pengawasan yang tepat.
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan disiplin pegawai agar tercipta budaya kerja yang lebih tertib, profesional, dan produktif.
- d. Menjadi dasar bagi pembuat kebijakan di pelabuhan untuk menyusun atau memperbaiki prosedur dan mekanisme penegakan disiplin yang adil dan berkeadilan.

3. Manfaat Bagi Pegawai

- a. Memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan disiplin dan konsekuensi pelanggaran yang harus dihindari.
- b. Meningkatkan motivasi dan kesadaran pegawai untuk mematuhi aturan disiplin demi mendukung kinerja dan karier mereka di pelabuhan.
- c. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan adil sehingga meningkatkan rasa keadilan dan kepuasan kerja pegawai.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan disiplin pegawai di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus.

2. Wawancara

Melakukan wawancara dengan kepala bagian sumber daya manusia/kepegawaian untuk mendapatkan data pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan uraian mengenai hal-hal yang akan dilaporkan secara sistematis bab demi bab dalam Tugas Akhir. Dari bab hasil laporan penulis diperoleh gambaran yang berurutan dan saling terkait. Sistematika penulisan Tugas Akhir terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat memaparkan teori-teori yang menjadi landasan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat gambaran ringkas objek penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diselesaikan oleh penulis.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan tugas akhir yang telah dibuat oleh penulis.